HUMAS DPRD KALTIM

FASILITASI: Pansus LKPj Gubernur Kaltim bahas tindak lanjut audit BPK bersama Sekdaprov dan OPD. Komunikasi satu arah dan sistem input online jadi kendala utama.

Upayakan Jembatani Pemprov dan BPK RI

BALIKPAPAN - Setelah menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah OPD pada pukul 10.00 WITA, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 kembali melanjutkan rapat serupa pada pukul 14.30 WITA, Rabu (30/4).

Dipimpin Ketua Pansus Agus Suwandi dan Wakil Ketua Pansus Agus Aras, rapat tersebut menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Inspektorat Daerah (Itda) Kaltim. Agenda utamanya yaitu membahas tindak lanjut perbaikan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur.

"Setelah kami mendengarkan penjelasan dari Sekda dan OPD, kami simpulkan bahwa memang ada upaya menindaklanjuti rekomendasi BPK, tetapi masih ada kendala teknis, terutama komunikasi satu arah dari OPD ke BPK RI," ujar Agus Suwandi.

Ia menjelaskan bahwa sistem input online milik BPK RI menjadi salah satu kendala. OPD mengalami kesulitan dalam mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, sementara hasil penilaian atas tindak lanjut hanya diumumkan dua kali dalam setahun. Hal ini memperlambat proses verifikasi perbaikan.

Pansus menilai perlu adanya perbaikan komunikasi antara Pemprov Kaltim dengan BPK RI. "Kami akan mengambil inisiatif untuk membangun komunikasi yang lebih maksimal," imbuh Agus.

Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni mengakui kendala tersebut dan menegaskan bahwa Pemprov Kaltim terus berupaya menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK secara bertahap.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Kaltim Irfan Prananta mencontohkan, dalam salah satu temuan, BPK meminta pengembalian sisa lebih pembiayaan sebesar Rp100 juta. Namun setelah dana dikembalikan, BPK menilai bukti setor tidak cukup dan meminta tambahan dokumen seperti rekening koran.

"Ini terjadi karena perbedaan persepsi antara tim pemeriksa lama dan tim baru," ujarnya. **(adv/hms4/ha/mh)**

@Koran Kaltim
02 Mei 2025
Halaman : 12